



**SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KAB.
KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

**LAPORAN
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA
(RENJA) SKPD 2024**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas kehendak-Nya Lah Penyusunan Laporan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Rencana Kerja (RENJA) SKPD disusun dengan membandingkan antara target sasaran kinerja dengan realisasi baik fisik maupun keuangan dengan menggunakan data yang ada pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga dihasilkan besaran capaian kerjanya.

Selanjutnya diharapkan laporan keterangan pertanggung jawaban ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar yang akan datang.

Disadari bahwa dalam penyusunannya belumlah sempurna, hal ini disebabkan kemampuan dan cara pandang yang berbeda sehingga diperlukan persamaan cara pandang yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Benteng, 10 Maret 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KAB. KEPULAUAN SELAYAR,**

**SAPARUDDIN, S.Sos, M.M
Pangkat : Pembina IV/a
NIP.19760901 200502 1 004**

DAFTAR ISI

	Uraian	Hal.
	Sampul	i
	Kata Pengantar	ii
	Daftar Isi	iii
Bab I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.3.1 Maksud	6
	1.3.2 Tujuan	6
	1.3.3 Sistmatika Penulisan	7
Bab II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
	2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar	25
	2.3 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
Bab III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
	3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
	3.2 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	31
	3.3 Program dan Kegiatan	34
Bab IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
Bab V	PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kep. Selayar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) Tahun. Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta

ditambah lagi dengan sub urusan pemadam kebakaran, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 8
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventrisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran, sehingga terjadi keterkaitan dan konsisten diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setiap tahun anggaran;

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal, yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilakukan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Selain itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditentukan dari

hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2022

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program sebagaimana kebijakan dan sasaran kerja yang

telah ditetapkan pada tahun 2022, adapun alokasi dana dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.
Kepulauan Selayar
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp.3.578.846.000	Rp. 3.550.235.548	99	Rp.28.610.548
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp.6.152.013.718	Rp.5.661.031.213	92	Rp.490.982.505
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.21.820.000	Rp.21.650.000	99	Rp.170.0000

Sumberdata : Sub Bagian Keuangan, 2022

Melihat tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa penyerapan alokasi dana tahun 2022 yang dikelola Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai 98,15%. Berarti bahwa dana yang belum bisa direalisasikan sampai akhir tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 180.473.661**

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 dan Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 ada pada tabel 2.1

Tabel 2

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Tahun Anggaran 2022

No	Program, Kegiatan	Anggaran		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Volum e	Rp.	Volume	%	Rp.	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						98,07
1	Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						96,23
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,320,000	2 Dokumen	100	2,320,000	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	100	2,980,000	99,33
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	100	2,510,000	83,67
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	100	2,950,000	98,33
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	100	4,830,000	96,60
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4,935,000	3 Laporan	100	4,865,000	98,58
2	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						97,74
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	3,578,846,000	49 Orang	100	3,500,378,686	97,81
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	100	10,000,000	100

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	100	600,000	20
3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						99,57
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1,002,000	1 Laporan	100	1,002,000	100
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Tahun	80,755,600	1 Tahun	100	80,404,400	99,57
4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah						97,12
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	100	15,000,000	100
2	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	100	15,000,000	100
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	25,221,800	12 Bulan	100	25,047,500	99,31
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	7.920.000	12 Bulan	100	7.620.000	96,21
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	15	0	0
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		309,000,000		100	298,727,780	96,68
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1,250,000		100	1,250,000	100
8	Pengadaan Mebel		0			0	0
5	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	0	0	00	100	0	0
6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						98,53
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	500,000	12 Bulan	100	500,000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Bulan	100,868,378	12 Bulan	100	71,228,566,	70,62

	Daya Air dan Listrik						
3	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	4,319,180,940	12 Bulan	100	4,284,278,730	99,19
7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						97,05
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	34,541,000	12 Bulan	100	34,528,500	99,96
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	449,896,000	12 Bulan	100	433,250,345	96,30
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	49,995,000	1 Unit	100	49,992,000	99,99
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	12 Bulan	33,350,000	12 Bulan	100	33,314,000	99,89
B	Program Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum						99,16
8	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						98,68
1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	25 kali	112,098,000	25 kali	100	112,098,000	100
2	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan	25 kali	500,000	25 kali	100	350,000	70

	perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa						
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		85,538,500		100	85,538,500	100
4	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	25	3,021,300	25	100	521,000	17,25
9	Kegiatan : Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota						99,46
1	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/Walikota	12 bulan	98,175,900	12 bulan	100	97,576,000	99,39
2	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/Walikota	12 Bulan	233,034,400	12 bulan	100	231,854,750	99,49
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						98,77
10	Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						99,79
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	82,638,000	1 Unit	100	82,598,000	99,95
2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	3 Unit	19,661,000	3 Unit	100	19,641,000	99,90
3	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 Unit	11,860,000	1 Unit	100	11,810,000	99,58

4	Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	27 Unit	21,820,000	27 Unit	100	21,650,000	99,28
11	Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						94,11
1	Pendataaan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	80 Kegiatan	3,060,000	83 Kegiatan	100	2,880,000	94,12
12	Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran						90,01
1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	12 Kegiatan	6,510,000	12 Kegiatan	100	5,860,000	90,02
13	Kegiatan :Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						95,50
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	2 Kegiatan	20,681,000	4 Kegiatan	100	19,751,000	95,50

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran yang diserap sebanyak 100% dari target sebanyak 100 % .
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, anggaran yang diserap sebanyak 99,33% dari target sebanyak 100 %
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD anggaran yang diserap 83,67% dari target sebanyak 100 %
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD anggaran yang diserap 98,33% dari target sebanyak 100 %
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran yang diserap 96,60% dari target sebanyak 100 %
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran yang diserap 98,58% dari target sebanyak 100%
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang diserap 97,81% dari target sebanyak 100%

8. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN anggaran yang diserap 100% dari target sebanyak 100%
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD anggaran yang diserap 20% dari target sebanyak 100%
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian anggaran yang diserap 100% dari target sebanyak 90%
11. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai anggaran yang diserap 99,57% dari target sebanyak 90%
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor anggaran yang diserap 100% dari target sebanyak 100%
13. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran yang diserap 100% dari target sebanyak 90%
14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran yang diserap 99,31% dari target sebanyak 90%
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan anggaran yang diserap 96,21% dari target sebanyak 100 %
16. Fasilitasi Kunjungan Tamu anggaran yang diserap 0% dari target sebanyak 90 %
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran yang diserap 96,68 % dari target sebanyak 100 %
18. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang diserap 100% dari target sebanyak 90%
19. Pengadaan Mebel anggaran yang diserap 0% dari target sebanyak 0%
20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya anggaran yang diserap 0% dari target sebanyak 0%
21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran yang diserap 100% dari target sebanyak 100%
22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran yang diserap 70,62% dari target sebanyak 100 %
23. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran yang diserap 99,19% dari target sebanyak 100%

24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan anggaran yang diserap 99,96% dari target sebanyak 100 %
25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran yang diserap 96,30% dari target sebanyak 100%
26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya anggaran yang diserap 99,99% dari target sebanyak 100%
27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya anggaran yang diserap 99,89% dari target sebanyak 90 %
28. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan anggaran yang diserap 100% dari target sebanyak 90 %
29. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa anggaran yang diserap 70% dari target sebanyak 100%
30. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum anggaran yang diserap 100% dari target sebanyak 100%
31. Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada anggaran yang diserap 17,25% dari target sebanyak 100%
32. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/Walikota anggaran yang diserap 99,39% dari target sebanyak 100%
33. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/Walikota anggaran yang diserap 99,49% dari target sebanyak 100%
34. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota anggaran yang diserap 99,95% dari target sebanyak 100%
35. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran anggaran yang diserap 99,90% dari target sebanyak 90%
36. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri anggaran yang diserap 99,58% dari target sebanyak 100%

37. Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri anggaran yang diserap 99,28% dari target sebanyak 100%
38. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran anggaran yang diserap 94,12% dari target sebanyak 100%
39. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran anggaran yang diserap 90,02% dari target sebanyak 100%
40. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat anggaran yang diserap 95,50% dari target sebanyak 100%

Dari 3 Program 13 kegiatan 40 Sub Kegiatan tersebut, terlaksana dengan baik dan memenuhi target, meskipun realisasi keuangan program kegiatan rata-rata mencapai 90%. *(Tabel T-C.29 Terlampir).*

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 676, dengan mengacu kepada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana di dalamnya dinyatakan bahwa Penyelenggaraan bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta pemadam kebakaran adalah urusan wajib Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur,

membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pemadaman kebakaran. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, Ketentraman dan Kerteban umum, Perlindungan masyarakat dan Pemdam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum , Perlindungan masyarakat, dan Pemadam Kebakaran serta Penyelamatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peratura daerah Kentenrman dan Ketertiban Umum Pelindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran serta Penyelamatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai Bidang Tugasnya.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Penyelamatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158), Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Penyelamatan.

Analisis kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar ada pada tabel T-C.30 (*terlampir*). Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah :

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Penyelamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 676).

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, meliputi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; meliputi:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meliputi:
 1. Seksi Pencegahan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang – undangan

daerah dan perlindungan masyarakat serta tanggap bencana kebakaran di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta tanggap bencana kebakaran mengingat bahwa letak Geografis Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan daerah kepulauan dan sangat luas sehingga diperlukan strategi dan kebijakan serta program yang khusus untuk mencapai target indikator sebagaimana yang telah ditetapkan/standar nasional.
- b. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta tanggap bencana kebakaran.
- c. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan.
- d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas.
- e. Keberadaan unit Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan hanya sebatas pelengkap semata dan tidak memiliki kewenangan dan tidak didukung operasional yang memadai.
- f. Belum adanya UPT pemadam kebakaran di setiap kecamatan
- g. Keterbatasan biaya operasional untuk melakukan patroli SatPol.PP dan operasional pemadam kebakaran.

- h. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Pemasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar terutama misi pertama dan ketiga. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan). Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat Satpol PP, pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.
2. Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai dengan SPM, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari. Begitupula dengan

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran, seperti mobil pemadam kebakaran, baku anti api, dan perlengkapan pemadaman api.

3. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta tanggap bencana kebakaran dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

2.3 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta tanggap bencana kebakaran di Kabupaten Kepulauan Selayar, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Penyelamatan membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan.

Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta tanggap bencana kebakaran di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024. Sedangkan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda RPJPD Tahun 2021 – 2026. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional.

Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat 7 prioritas dimana prioritas diantaranya memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Kabupaten Kepulauan Selayar masuk dalam misi pertama yaitu “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan” dan misi ketiga yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”. Untuk mendukung pencapaian misi kedua Kabupaten Kepulauan Selayar serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, disusunlah lima strategi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta tanggap terhadap bencana kebakaran di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu:

1. Strategi pencapaian kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2022
2. Strategi aparatur, diarahkan pada peningkatan kapabilitas aparatur dalam rangka menunjang terwujudnya pelayanan yang lebih baik.

3. Strategi pengembangan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum.
4. Strategi penggunaan dana, diarahkan pada prioritas penertiban administrasi keuangan yang menunjang akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang akuntabel.
5. Strategi Pencapaian Indikator Kinerja, diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta tanggap terhadap bencana kebakaran dan non kebakaran di Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan dengan visi RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026 yaitu: “*KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, misi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Selayar Tahun 2021 – 2026 yang berkaitan misi RPJMD adalah misi pertama dan ketiga, yaitu:

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran misi yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan

Misi 1. **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik (T-1)
2. Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif (T-2)

Misi 3. **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran (T-3)

3.2.2 Sasaran

Sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar serta tujuan yang ditetapkan diatas, maka sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah :

1. Meningkatnya Nilai SAKIP
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
4. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada
5. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai OPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta tanggap bencana kebakaran di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sejalan dengan Misi kedua Kabupaten Kepulauan Selayar, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, terdiri dari 3 program, 13 kegiatan dan 40 sub kegiatan, dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif yaitu **Rp. 10.963.015.055,-**. Untuk lebih jelasnya rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.33 (TabelTerlampir).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara lengkap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun Anggaran 2024 merumuskan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai rancangan awal RKPD sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.10,310,035,911

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp 47,250,000
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp 10,500,000
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan alokasi anggaran Rp 5,250,000
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD dengan alokasi anggaran Rp 5,250,000
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD dengan alokasi anggaran Rp 5,250,000
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 10,500,000
 - f. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran 10,500,000
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.4,433,250,681
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran Rp 4,332,807,051

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95,193,630
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran Rp 5.250.000
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.4,476,200
- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 1,002,000
 - b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3,474,200
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Dengan anggaran Sebesar Rp. 577,032,909
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 5,472,974
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 21,000,000
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 31,220,000
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 7,920,000
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 20,000,000
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 497,169,935
 - g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 1,250,000

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 60,729,395
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran Rp. 10,729,395
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 50,000,000
6. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 4,728,685,800
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 1,000,000
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 190,680,000
 - c. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 4,537,005,800
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.458,610,926
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 36,050,000
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 320,560,926
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 10,000,000

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 50,000,000
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 42,000,000

B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan anggaran sebesar Rp. 420,643,348

- 1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 216,666,730
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 175,082,058
 - b. Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 2,597,657
 - c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 30,132,817
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada dengan alokasi anggaran Rp. 8,854,198
- 2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dengan alokasi anggaran Rp. 203,976,618

- a. Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/Walikota dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 82,548,333
- b. Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/Walikota dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 121,428,285

C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp 232,335,796

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 186,295,796
 - a. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 108,640,000
 - b. Sub Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 33,485,796
 - c. Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 12,500,000
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 31,670,000
2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dengan alokasi anggaran Rp 4,000,000

- a. Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp4,000,000
3. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran dengan alokasi anggaran Rp17,040,000
 - a. Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 17,040,000
4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan alokasi anggaran Rp25,000,000
 - a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 25,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Penyusunan dokumen rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada dokumen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan 2021-2026, serta berdasarkan atas hasil analisis capaian kinerja pelayanan PD dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja pada tahun sebelumnya (2022) sampai dengan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (2023). Disamping itu penentuan program dan kegiatan yang menjadiprioritas pada tahun 2024 juga didasarkan pada isu-isu strategis PD dan hasil evaluasi terhadap hambatan-hambatan, tantangan serta peluang yang ada.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Selayar ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, Maret 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KAB. KEPULAUAN SELAYAR,**

**SAPARUDDIN,S.Sos.,M.M
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19760901 200502 1 004**

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Provinsi /Kabupaten/Kota Selayar

Satuan Polisi Pomong Praja , Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Lembar
:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program Dan Kegiatan (Ranja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan		
					Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingk at Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingk at Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Outcome : Presentase Capaian Kinerja % Presentase Capaian Kinerja Keuangan %	10,310,035,911	6,426,333,311	9,286,581,718	8,882,577,507	96	8,613,474,230	23,922,385,048	232.03	
01	2.01	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	47,250,000	188,216,700	21,255,000	20,455,000	96	40,500,000	249,171,700	527.35
01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,500,000	65,482,940	2,320,000	2,320,000	100	10,000,000	77,802,940	740.98

		01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Output :	jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,250,000	45,143,780	3,000,000	2,980,000	99	5,500,000	53,623,780	1021.41
		01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Output :	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD								
		01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Output :	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	5,250,000	30,686,540	3,000,000	2,510,000	84	5,000,000	38,196,540	727.55
		01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Output :	Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	5,250,000	4,960,000	3,000,000	2,950,000	98	-	7,910,000	150.6667
		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Output :	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,500,000	10,200,000	5,000,000	4,830,000	97	10,000,000	25,030,000	238.38
		01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output :	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,500,000	31,743,440	4,935,000	4,865,000	99	10,000,000	46,608,440	443.89

		01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	4,433,250,681	4,223,095,320	3,591,846,000	3,510,978,686	218	3,785,251,930	11,519,325,936	259.84
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,332,807,051	4,060,600,000	3,578,846,000	3,500,378,686	98	3,758,251,930	11,319,230,616	261.24
		01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95,193,630	88,020,000	10,000,000	10,000,000	100	5,000,000	103,020,000	108.22
		01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Output : Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	-	24,343,440	-	-		5,000,000	29,343,440	
		01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Output : Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	25,543,440	-	-		5,000,000	30,543,440	
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output : Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,250,000	3,845,000	-	-		7,000,000	10,845,000	206.57
		01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Output : Jumlah dokumen bahan tanggapan di Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-							

	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Output : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	-	20,743,440	3,000,000	600,000	20	5,000,000	26,343,440	
	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Output : Jumlah dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-							
	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	-	29,815,160	-	-	-	18,000,000	47,815,160	
	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Output : Jumlah Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Output : Jumlah dokumen Pengamanan Barang milik Daerah SKPD								
	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Output : Jumlah laporan hasil Penilaian barang milik Daerah dan hasil Koordinasi Penilaian barang milik Daerah SKPD								

					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik pada SKPD	Output :	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian barang milik Daerah pada SKPD										
		01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Output :	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah pada SKPD	-	21,243,440	-	-		10,000,000	31,243,440			
		01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Output :	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	8,571,720	-	-		8,000,000	16,571,720			
		01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Output :	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										
		01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase aparatur yang ditingkatkan kualitas dan kapabilitasnya		4,476,200	263,919,960	81,757,600	81,406,400	200	99,387,000	397,529,480			8880.959
		01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Output :	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	20,643,440	-	-		-	20,643,440			
		01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Output :	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	-									
		01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Output :	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-	21,043,440	-	-		5,497,000	26,540,440			

	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Output :	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,002,000	21,165,440	1,002,000	1,002,000	100	5,478,000	27,645,440	2759.03
	01	2.05	05	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Output :	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3,474,200	41,067,640	80,755,600	80,404,400	100	47,412,000	168,884,040	4861.09
	01	2.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Output :	Jumlah pegawai pensiun yang di pulangkan	-							
	01	2.05	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Output :	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan Tugas	-							
	01	2.05	8	Pemindahan Tugas ASN	Output :	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	-							
	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output :	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-							
	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Output :	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang - undangan	-							
	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Output :	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang - undangan	-							
	01	2.05	12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output :	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	160,000,000	-	-		41,000,000	201,000,000	
	01	2.05	13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Output :	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-							

		01	2.05	14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-							
		01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	577,032,909	797,583,745	603,391,800	362,645,280	60	518,784,300	1,679,013,325	290.974
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5,472,974	9,000,000	15,000,000	15,000,000	100	21,663,000	45,663,000	834.3361
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Output : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21,000,000	23,000,000	15,000,000	15,000,000	100	25,434,000	63,434,000	302.0667
		01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Jumlah paket peralatan rumah tangga yang di sediakan								
		01	2.06	04	Penyediaan Logistik Kantor	Output : Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan								
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output : Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	31,220,000	31,219,800	255,221,800	25,047,500	10	22,390,300	78,657,600	251.95
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	7,920,000	7,620,000	7,920,000	7,620,000	96	4,200,000	19,440,000	245.45

		01	2.06	07	Penyediaan Bahan Material	Output :	Jumlah Paket bahan/ Material yang disediakan									
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output :	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	20,000,000	55,019,440	-	-	-	-	55,019,440	275.10	
		01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Output :	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	490,169,935	619,124,525	309,000,000	298,727,780	97	445,097,000	1,362,949,305	278.06	
		01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Output :	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1,250,000	21,313,440	1,250,000	1,250,000	100	-	22,563,440	1805.08	
		01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Output :	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		31,286,540	-	-	#DIV/0!	-	31,286,540		
		01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	60,729,395	294,588,500	-	-	-	-	294,588,500	485.08	
		01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output :	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan									
		01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output :	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		273,964,000	-	-	-	-	273,964,000		
		01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Output :	Jumlah paket mebel yang disediakan	10,729,395	-	-	-	-	-	-	0.00	

			04	Pengadaan Alat Besar	Output :	Jumlah unit alat besar yang disediakan	-							
			05	Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor		Jumlah unit alat angkut darat tak bermotor yang disediakan	-							
	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output :	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-							
			07	Pengadaan Aset tak Berwujud		Jumlah unit aset tetap tak berwujud yang disediakan	-							
	01	2.07	08	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output :	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-							
	01	2.07	9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Output :	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	50,000,000	20,624,500	-	-	-	20,624,500	41.25	
	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output :	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	-							
	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4,728,685,800	197,066,463	4,420,549,318	4,356,007,296	99	3,623,861,000	8,176,934,759	172.92	

	01	2.08	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Output :	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1,000,000	21,143,440	500,000	500,000	100	5,500,000	27,143,440	2714.34
	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Output :	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	190,680,000	91,808,143	100,868,378	71,228,566	71	185,000,000	348,036,709	182.52
	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output :	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan								
	01	2.08	04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output :	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4,537,005,800	84,114,880	4,319,180,940	4,284,278,730	99	3,433,361,000	7,801,754,610	171.96
	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang dipelihara		458,610,926	432,047,463	567,782,000	551,084,845	97	527,690,000	1,510,822,308	329.43
	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output :	Jumlah kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	36,050,000	34,531,000	34,541,000	34,528,500	100	35,130,000	104,189,500	289.01
	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output :	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	320,560,926	317,041,463	449,896,000	433,250,345	96	432,810,000	1,183,101,808	369.07

		02	2.10	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Output :	Jumlah alat besar yang dipelihara dan di bayarkan perizinanya											
		03	2.11	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Output :	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang di pelihara dan dibayarkan perizinanya											
				05	Pemeliharaan Mebel	Output :	Jumlah mebel yang dipelihara											
		04	2.12	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output :	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10,000,000										
		05	2.13	07	Pemeliharaan Aset tetap Lainnya		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara											
		06	2.14	08	Pemeliharaan Aset tak Berwujud		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara											
		07	2.15	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output :	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	50,000,000	49,995,000	49,995,000	49,992,000	100	39,900,000	139,887,000			279.774	
		08	2.16	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Output :	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	42,000,000	30,480,000	33,350,000	33,314,000	100	19,850,000	83,644,000			199.1524	
		09	2.17	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Output :	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi											

		1 0	2.1 8	12	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Tanah		Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi								
		1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Outco me :	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)								
							Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	420,643,348	2,534,552,103	532,368,100	527,938,250	99	647,619,000	3,710,109,353	882.01
	1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	216,666,730	2,062,529,440	201,157,800	198,507,500	99	100,000,000	2,361,036,940	1089.71
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Outpu t :	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli ,Pengamanan, dan Pengawasan	175,082,058	1,110,786,520	112,098,000	112,098,000	100	83,620,000	1,306,504,520	746.22

1	0	0	2.	02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Output :	Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2,597,657	837,753,440	500,000	350,000	70	4,191,000	842,294,440	32425.16
1	0	0	2.	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat tingkat kabupaten/kota	Output :	jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota								
1	0	0	2.	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Output :	Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	30,132,817	113,989,480	85,538,500	85,538,500	100	8,083,000	207,610,980	688.9863
1	0	0	2.	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Output :	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-

1	0	0	2.	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Output :	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan										
1	0	0	2.	07	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Output :	jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia										
1	0	0	2.	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Output :	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan										
1	0	0	2.	09	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Output :	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	8,854,198	-	3,021,300	521,000	17	4,106,000	4,627,000		52.2577	
	1	0	02	2.	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Persentase penurunan pelanggaran perda	203,976,618	472,022,663	331,210,300	329,430,750	99	547,619,000	1,349,072,413		661.39	
1	0	0	2'0	01	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan	Output :	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi	-	29,877,500	-	-		-	29,877,500			

					peraturan bupati		penegakan perda / perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha									
1	05	02	202	02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati	Output :	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	82,548,333	131,080,700	98,175,900	97,576,000	99	218,000,000	446,656,700	541.09	
1	05	02	202	03	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/Walikota	Output :	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	121,428,285	311,064,463	233,034,400	231,854,750	99	329,619,000	872,538,213	718.56	
1	05	02	02	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Presentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dibina		-	-	-	-	0	-			

1	0	0	2.	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Output :	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	-	-	-	-	0	-	-	
1	0	0	2		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Outcome :	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	232,335,796	2,077,782,560	166,230,000	164,190,000	99	156,735,000	2,398,707,560	1032.431
							Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran								
	1	0	04	2	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kejadian Kebakaranyang ditangani		186,295,796	1,944,085,800	135,979,000	135,699,000	100	122,072,000	2,201,856,800	1181.91
						Presenase Potensi Terjadinya Kebakaran yang dicegah dan dikendalikan									
1	0	0	2.	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output :	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/ Penanggulangan /Kota Setiap Tahunnya								

1	0	0	2.	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output :	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota	108,640,000	1,756,767,040	82,638,000	82,598,000	100	73,870,000	1,913,235,040	1761.08
1	0	0	2.	03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Output :	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan / Evakuasi saat penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	33,485,796	82,250,040	19,661,000	19,641,000	100	14,000,000	115,891,040	346.09
1	0	0	2.	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output :	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan beerbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten /Kota								
1	0	0	2.	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Output :	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan standarisasi sarana dan prasaran Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara	12,500,000	55,068,720	11,860,000	11,810,000	100	16,402,000	83,280,720	666.25

					Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran								
1	0	0	2.		'Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana yang diinspeksi		4,000,000	29,273,440	3,060,000	2,880,000	94	-	32,153,440	803.84
1	0	0	2.0	01	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Output :	Jumlah dokumen yang memuat dataBangunan/Gedung/Lingkungan yang , memenuhi Kelaikan standarsarana dan prasarana proteksi kebakaran	4,000,000	29,273,440	3,060,000	2,880,000	94	-	32,153,440	803.84
1	0	0	2.0	02	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Output :	Jumlah dokumen yang memuat dataBangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran								
1	0	0	2.		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang diinvestigasi		17,040,000	34,183,440	6,510,000	5,860,000	90	5,053,000	45,096,440	264.65

1	0	0	2.0	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Output : Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan meliputi penelitian dan pengujian dan penelitian	17,040,000	34,183,440	6,510,000	5,860,000	90	5,053,000	45,096,440	264.65
1	0	0	2.04		'Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Kegiatan pemberdayaan dalam pencegahan kebakaran	25,000,000	70,239,880	20,681,000	19,751,000	96	29,610,000	119,600,880	478.40
1	0	0	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Output : Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	25,000,000	70,239,880	20,681,000	19,751,000	96	29,610,000	119,600,880	478.40
1	0	0	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Output : Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya								

1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Output :	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang telah tersedia dukungan sapsras Damkar										
1	05	04	2.05		'Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Presentase penyelamatan kejadian yang membahayakan keselamatan manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan atau Mengancam Keselamatan Manusia	Output :	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia										
1	05	04	2.05	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan	Output :	Jumlah dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sesuai standar										
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Output :	Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis										

1	0	0	2.0	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan evakuasi	Output :	Jumlah laporan hasil pembinaan Aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal										
JUMLAH TOTAL								10,963,015,055	11,038,667,974	9,985,179,818	9,574,705,757	96	9,417,828,230	30,031,201,961	274		

**KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN**

SAPARUDDIN,S.Sos., M.M
NIP. 19760901 200502 1 004

TABEL T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Presentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	91,10		100%	100%	100%	89,06%	92,68%	100%	100%	
4	Waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran	Menit	11,95	11,26	11,26	10,93	10,61	9,01	7,58	10,93	10,61	

**LAPORAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA (RENJA) SKPD 2024**

Tabel 3.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(4)	(5)	(6)	(8)	(7)	(10)	(11)	
1				Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	0	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
1	0	0		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan	Presentase Capaian Kinerja % Presentase Capaian Kinerja Keuangan %	Kab.Kep.Selayar	70.53 88	10,310,035,911		71.51 91	12,372,043,093	

1	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Kab.Kep.Selayar	100%	47,250,000			100%	56,700,000	
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kep.Selayar	2 Dokumen	10,500,000	DAU		2 Dokumen	12,600,000	
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Kep.Selayar	2 dokumen	5,250,000	DAU		2 dokumen	6,300,000	
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab.Kep.Selayar	Dokumen				Dokumen		
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kab.Kep.Selayar	1 Dokumen	5,250,000	DAU		1 Dokumen	6,300,000	
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kab.Kep.Selayar	1 Dokumen	5,250,000	DAU		1 Dokumen	6,300,000	
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kep.Selayar	1 Laporan	10,500,000	DAU		1 Laporan	12,600,000	-
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kep.Selayar	3 Laporan	10,500,000	DAU		3 Laporan	12,600,000	

1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	<i>Kab.Kep.Se layar</i>	100%	4,433,250, 681			100%	5,319,900, 817	-
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kep.Se layar	46 Orang	4,332,807,051			46 Orang	5,199,368,461	
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Kep.Se layar	12 Dokumen	95,193,630	DAU		12 Dokumen	114,232,356	
				3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Kep.Se layar	Dokumen	-			Dokumen		
				4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasidan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.Kep.Se layar	Dokumen	-			Dokumen		
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Kep.Se layar	1 Laporan	5,250,000	DAU		1 Laporan	6,300,000	
				6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan di Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab.Kep.Se layar	Dokumen	-			Dokumen		
				7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Kab.Kep.Se layar	Laporan	-			Laporan		
				8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Kep.Se layar	Dokumen	-			Dokumen		

				1	Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab.Kep.Se layar	Unit				Unit	-		
				2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Kep.Se layar	paket				paket	-		
				3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab.Kep.Se layar	Dokumen				Dokumen	-		
				4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinas dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab.Kep.Se layar	12 Dokumen	1,002,000	DAU		12 Dokumen	1,202,400		
				5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Kep.Se layar	12 Dokumen	3,474,200	DAU		12 Dokumen	4,169,040		
				6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang di pulangkan	Kab.Kep.Se layar	Orang				Orang	-		
				7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan Tugas	Kab.Kep.Se layar	Laporan				Laporan	-		
				8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	Kab.Kep.Se layar	Orang				Orang	-		
				9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab.Kep.Se layar	Orang	-			Orang	-		
				10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Kab.Kep.Se layar	Orang				Orang	-		

				1	Bimbingan Teknisi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Kab.Kep.Se layar	Orang				Orang	-	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	Kab.Kep.S elayar	100%	577,032,909			100%	692,439,491	-
				1	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	6 Paket	5,472,974	DAU		6 Paket	6,567,569	
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	6 Paket	21,000,000	DAU		6 Paket	25,200,000	
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang di sediakan	Kab.Kep.Se layar	Paket				Paket	-	
				4	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	Paket				Paket	-	
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	12 Paket	31,220,000	DAU		12 Paket	37,464,000	
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	12 Dokumen	7,920,000	DAU		12 Dokumen	9,504,000	
				7	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket bahan/ Material yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	Paket				Paket		
				8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kab.Kep.Se layar	12 Laporan	20,000,000	DAU		12 Laporan	24,000,000	

				9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Kep.Se layar	12 Laporan	490,169,935	DAU		12 Laporan	588,203,922	
				10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab.Kep.Se layar	12 Dokumen	1,250,000	DAU		12 Dokumen	1,500,000	
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab.Kep.Se layar	Laporan		DAU		Laporan	-	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab.Kep.S elayar	100%	60,729,395			100%	72,875,274	
				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	Unit				Unit	-	
				2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	Unit				Unit	-	
				3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	Unit				Unit	-	
				4	Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah unit alat angkut darat tak bermotor yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	Unit				Unit	-	
				5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	1 Paket	10,729,395	DAU		1 Paket	12,875,274	

				6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	Unit				Unit	-	
				7	Pengadaan Aset tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	Unit				Unit	-	
				8	Pengadaan Aset tak Berwujud	Jumlah unit aset tetap tak berwujud yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	Unit				Unit	-	
				9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	Unit				Unit	-	
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	5 Unit	50,000,000	DAU		5 Unit	60,000,000	
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	Kab.Kep.Se layar	Unit				Unit	-	
					Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab.Kep.S elayar	100%	4,728,685,800			100%	5,674,422,960	
				1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Kep.Se layar	12 Laporan	1,000,000	DAU		12 Laporan	1,200,000	
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	12 Laporan	190,680,000	DAU		12 Laporan	228,816,000	
				3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab.Kep.Se layar	Laporan				Laporan	-	

			4	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab.Kep.Selayar	12 Laporan	4,537,005,800	DAU		12 Laporan	5,444,406,960	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang dipelihara	Kab.Kep.Selayar	100%	458,610,926			100%	550,333,111	
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab.Kep.Selayar	1 Unit	36,050,000	DAU		1 Unit	43,260,000	
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab.Kep.Selayar	27 Unit	320,560,926	DAU		27 Unit	384,673,111	
			3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan di bayarkan perizinannya	Kab.Kep.Selayar	1 Unit				1 Unit	-	
			4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang di pelihara dan dibayarkan perizinannya	Kab.Kep.Selayar	1 Unit				1 Unit	-	
			5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab.Kep.Selayar	1 Unit				1 Unit	-	
			6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab.Kep.Selayar	6 Unit	10,000,000	DAU		6 Unit	12,000,000	

				7	Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Kab.Kep.Selayar	1 Unit				1 Unit	-	
				8	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Kab.Kep.Selayar	1 Unit				1 Unit	-	
				9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab.Kep.Selayar	1 Unit	50,000,000	DAU		1 Unit	60,000,000	
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	Kab.Kep.Selayar	51 Unit	42,000,000	DAU		51 Unit	50,400,000	
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	Kab.Kep.Selayar	1 Unit				1 Unit	-	
				12	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi	Kab.Kep.Selayar	Ha				Ha	-	
1	0	0			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		100%				100%		
	5	2				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Kab.Kep.Selayar	100%	420,643,348			100%	504,772,018	
1	0	0	2.		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Kep.Selayar	97%	216,666,730			97%	260,000,076	

					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	yang ditangani								
1	0	0	2.	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab.Kep.Selayar	27 Kasus	175,082,058	DAU		27 Kasus	210,098,470	-
1	0	0	2.	2	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab.Kep.Selayar	5 Kasus	2,597,657	DAU		5 Kasus	3,117,188	
1	0	0	2.	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat tingkat kabupaten/kota	jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota	Kab.Kep.Selayar	Dokumen				Dokumen	-	
				4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam	Kab.Kep.Selayar	1 Dokumen	30,132,817	DAU		1 Dokumen	36,159,380	

				Umum	rangka ketentraman dan ketertiban umum								
			5	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat tingkat kabupaten/kota	jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota	Kab.Kep.Se layar	Dokumen					Dokumen	-
			6	Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksaaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Kab.Kep.Se layar	Orang					Orang	-
			7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kab.Kep.Se layar	Dokumen					Dokumen	-
			8	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasana Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	Kab.Kep.Se layar	Unit					Unit	-

				9	Penyediaan Layanan dalam Rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	Kab.Kep.Selayar	1 Laporan	8,854,198			1 Laporan	10,625,038	
1	0	0	2.		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penurunan pelanggaran perda	Kab.Kep.Selayar	90%	203,976,618			90%	244,771,942	-
1	0	0	2.	1	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda / perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha	Kab.Kep.Selayar	Laporan				Laporan	-	-
1	0	0	2.	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab.Kep.Selayar	39 Laporan	82,548,333	DAU		39 Laporan	99,058,000	-
1	0	0	2.	3	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	Kab.Kep.Selayar	46Laporan	121,428,285	DAU		46Laporan	145,713,942	-
1	0	0	2.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Presentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dibina	Kab.Kep.Selayar	85%	-			85%	-	-

1	0	0	2.	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Kab.Kep.Selayar	Laporan			Laporan	-	
1	0	0	2.	1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	Kab.Kep.Selayar	100%	232,335,796		100%	278,802,955	-
						Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		10.93			10.61		
1	0	0	2.	01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kejadian Kebakaran yang ditangani	Kab. Kep. Selayar	90%	186,295,796		90%	223,554,955	
						Presenase Potensi Terjadinya Kebakaran yang dicegah dan dikendalikan		80%			80%		
				1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/ Penanggulangan /Kota Setiap Tahunnya	Kab.Kep.Selayar	Dokumen	-		Dokumen		
1	0	0	2.	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan Pemadaman Kebakaran dalam	Kab.Kep.Selayar	12 Laporan	108,640,000	DAU	12 Laporan	130,368,000	-

					Daerah kabupaten/Kota									
				3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan / Evakuasi saat penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab.Kep.Selayar	12 Dokumen	33,485,796	DAU		12 Dokumen	40,182,955	-
				4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan beerbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten /Kota	Kab.Kep.Selayar	Dokumen				Dokumen		
1	0	0	2.	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan standarisasi sarana dan prasaran Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara berkala (Setiap tahun), sah, dan Legal	Kab.Kep.Selayar	4 Dokumen	12,500,000	DAU		4 Dokumen	15,000,000	-
				6	Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan prasarana untuk Pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar tekns terkait	Kab.Kep.Selayar	10 Unit	31,670,000	DAU		10 Unit	38,004,000	

				7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Kab.Kep.Selayar	Orang				Orang	-	
				8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa / Kelurahan yang memiliki sistem Komunikasi dan Informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara Perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan setiap tahunnya	Kab.Kep.Selayar	Desa/Kelurahan				Desa/Kelurahan		
1	0	0	2.	9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab.Kep.Selayar	Dokumen				Dokumen	-	
1	0	0	2.		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana yang diinspeksi	Kab.Kep.Selayar	100%	4,000,000			100%	4,800,000	

1	0	0	2.	0	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang , memenuhi Kelaikan standar sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Kab.Kep.Selayar	10 Dokumen	4,000,000	DAU		10 Dokumen	4,800,000	
				2	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran		Dokumen				Dokumen		
1	0	0	2.		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang diinvestigasi	Kab.Kep.Selayar	100%	17,040,000			100%	20,448,000	
1	0	0	2.	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan meliputi penelitian dan pengujian dan penelitian	Kab.Kep.Selayar	12 Dokumen	17,040,000	DAU		12 Dokumen	20,448,000	
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Kegiatan pemberdayaan dalam pencegahan kebakaran	Kab.Kep.Selayar	100%	25,000,000			100%	30,000,000	
				1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	Kab.Kep.Selayar	300 Orang	25,000,000	DAU		300 Orang	30,000,000	-
				2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam	Kab.Kep.Selayar	Desa/Kelurahan				Desa/Kelurahan	-	

					kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya								
				3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang telah tersedia dukungan sapsras Damkar	Kab.Kep.Selayar	Dokumen				Dokumen	-
1	0	0	2.	05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Presentase penyelamatan kejadian yang membahayakan keselamatan manusia	Kab.Kep.Selayar	100%	-			100%	-
				1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	Kab.Kep.Selayar	Laporan				Laporan	-
				2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan	Jumlah dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sesuai standar	Kab.Kep.Selayar	Dokumen				Dokumen	-

				3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	Kab.Kep.Selayar	Unit				Unit	-	
				4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi	Jumlah laporan hasil pembinaan Aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	Kab.Kep.Selayar	Laporan				Laporan	-	
JUMLAH TOTAL									10,963,015,055				13,155,618,066	

Benteng, 10 Maret 2023
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
 PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KAB. KEPULAUAN SELAYAR,**

SAPARUDDIN, S. Sos, M.M
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19760901 200502 1 004

